

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Ahmad Khairuzad
NIM : 20130610170
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA
Dosen Pembimbing : Beni Hidayat, S.H.,M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 15%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 20-12-2018
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 November 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/11002/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 281/A.4-II/XI/2018
Tanggal : 12 November 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : AHMAD KHAIRUZAD
NIM : 20130610170
No.HP/Identitas : 085349326446/6308052605950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 15 November 2018 s.d 20 Desember 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2264
5573/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/11002/Kesbangpol/2018 Tanggal : 14 November 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Ahmad Khairuzad
No. Mhs/ NIM : 20130610170
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Brawijaya Tamantirto Yogyakarta
Penanggungjawab : Beni Hidayat. S.H., M.Hum.,
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19 November 2018 s/d 19 Februari 2019
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :



1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Ahmad Khairuzad

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 November 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekertaris



Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
 3. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
 4. Ka. Dinas Penanaman Modal & Perizinan Kota Yogyakarta
 5. Ybs.



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air, maka Pemerintah Kota Yogyakarta berwenang melakukan pengelolaan kualitas air di wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis, maka perlu adanya izin pembuangan limbah cair dan izin pemanfaatan limbah cair;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Walikota Yogyakarta tentang izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah cair;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata.
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
3. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
4. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
5. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri.
7. Pelayanan Kesehatan adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
8. Jasa Pariwisata adalah jasa yang diberikan dalam bentuk pelayanan penginapan, transportasi yang dikelola secara komersial, salon dan pelayanan sajian makanan yang meliputi : hotel berbintang, hotel melati, pondok wisata, pasar swalayan/ mal, restoran serta rumah makan besar.
9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pembuangan limbah cair adalah pembuangan limbah cair suatu perusahaan ke media air melalui outlet instalasi pengolahan limbah cair.
11. Outlet adalah tempat pembuangan setelah melalui suatu sistem proses pengolahan limbah cair.

12. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air
13. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air.
14. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
15. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung didalam air atau limbah cair.
16. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
17. Pemanfaatan limbah cair untuk aplikasi pada tanah yang selanjutnya disebut Pemanfaatan limbah cair adalah pemanfaatan limbah cair suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
18. Media air adalah tempat atau wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini sungai, rawa, danau, waduk dan/atau muara.
19. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL) dan Audit Lingkungan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup

dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
24. Penanggung jawab adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair.
25. Daerah adalah Kota Yogyakarta
26. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
27. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. perizinan yang terdiri dari :
 1. izin pembuangan limbah cair;
 2. izin pemanfaatan limbah cair.
- b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair dan /atau pemanfaatan limbah cair.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada SKPD.

Pasal 4

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
- b. dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. izin – izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 5

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
- b. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Pasal 6

Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pemohon izin;
- b. ruang lingkup (jenis) limbah cair yang akan dimohonkan izin;
- c. sumber dan karakteristik limbah cair;
- d. sistem pengelolaan limbah cair;
- e. debit, volume, dan kualitas limbah cair;
- f. lokasi titik penataan dan pembuangan limbah cair;
- g. jenis dan kapasitas instalasi pengelolaan;
- h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
- i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
- j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 7

- (1) Kajian dampak pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan limbah cair.
- (2) Apabila dalam dokumen pengelolaan lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL tidak memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan limbah cair diwajibkan untuk membuat kajian mengenai pembuangan limbah cair sesuai izin terkait.

Bagian Kedua
Izin Pemanfaatan Limbah Cair
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan limbah cair untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada SKPD.

Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
- b. dokumen AMDAL, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. izin – izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa kajian pemanfaatan limbah cair pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:

- a. kajian pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
- c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

Pasal 11

Formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pemohon izin;
- b. jenis dan kapasitas produksi bulanan;
- c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;

- d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
- e. ruang lingkup limbah cair yang akan dimintakan izin;
- f. sumber dan karakteristik limbah cair yang dihasilkan;
- g. jenis dan karakteristik limbah cair yang dimanfaatkan;
- h. sistem pengelolaan limbah cair untuk memenuhi kualitas limbah cair yang akan dimanfaatkan;
- i. debit, volume dan kualitas limbah cair yang dihasilkan;
- j. debit, volume dan kualitas limbah cair yang dimanfaatkan;
- k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan limbah cair;
- l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan limbah cair;
- m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
- n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
- o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 12

- (1) Kajian pemanfaatan limbah cair ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian pemanfaatan limbah cair pada tanah.
- (2) Apabila dalam dokumen pengelolaan lingkungan berupa AMDAL / UKL-UPL tidak memuat secara lengkap kajian pemanfaatan limbah cair diwajibkan untuk membuat kajian mengenai pemanfaatan limbah cair sesuai izin terkait.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD dengan menggunakan formulir permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermaterai cukup.
- (3) Kepala SKPD wajib menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan.
- (4) Apabila setelah berkas permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair diterima dan dilakukan pembahasan ditemukan hal-hal yang

perlu diperbaiki, maka Kepala SKPD mengembalikan permohonan dengan disertai catatan perbaikan.

- (5) Pemohon melakukan perbaikan terhadap catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD.
- (6) Setelah pemohon menyerahkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah dilakukan pembahasan.
- (7) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan besaran daya tampung beban pencemaran tidak memenuhi ketentuan, maka permohonan ditolak.
- (8) Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan.
- (9) Setelah dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD.
- (10) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang I.
- (11) Setelah dilakukan verifikasi lapangan ulang I sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila masih ditemukan ketidaksesuaian data dan materi, maka pemohon melakukan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sudah diserahkan kepada Kepala SKPD.
- (12) Setelah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dilakukan verifikasi lapangan ulang II.
- (13) Pemberian atau penolakan izin dilakukan Kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukan verifikasi lapangan ulang II.
- (14) Bentuk dan Isi formulir permohonan Izin, Keputusan Izin, Keputusan Penolakan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin

Pasal 14

Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Permohonan Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin pembuangan limbah cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair disampaikan kepada Kepala SKPD secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan izin pembuangan limbah cair sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta

persyaratan Izin Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini.

Bagian Keenam

Berakhirnya Izin

Pasal 16

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku izin berakhir;
 - b. izin dicabut;
 - c. pembatalan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila :
 - a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu limbah cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya ; atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
 - a. ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon; atau
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin dicabut atau dibatalkan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.
- (3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila pembuangan limbah cair membahayakan keselamatan jiwa.
- (4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan.

BAB III LARANGAN Pasal 19

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang :

- a. membuang limbah cair ke dalam air atau sumber air tanpa izin dari SKPD;
- b. melakukan pengenceran air limbah ;
- c. membuang limbah cair ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- d. melakukan pembuangan limbah cair ke dalam air atau sumber air dengan kualitas yang melebihi Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan;
- e. melakukan runoff ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan;
- f. melakukan pemanfaatan limbah cair di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian;
- g. membuang limbah cair yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

BAB IV KEWAJIBAN Pasal 20

Setiap penanggung jawab wajib :

- a. memiliki saluran pembuangan limbah cair sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan limbah cair sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit limbah cair di luar areal kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan limbah cair dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan limbah cair harian;
- d. mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas limbah cairnya ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;

- f. menyampaikan laporan kepada SKPD mengenai pembuangan limbah cair termasuk volume limbah cair yang dihasilkan, catatan debit aliran pembuangan limbah cair, hasil uji kualitas limbah cair dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan;
- h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada SKPD bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas limbah cair yang sebenarnya dibuang.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis lingkungan hidup;
 - b. pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - c. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat;
 - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen lingkungan hidup, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - e. mengambil contoh dari limbah cair yang dihasilkan, limbah cair yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2014
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 9

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN IZIN, KEPUTUSAN IZIN,
KEPUTUSAN PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU
IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran : Walikota Yogyakarta
Perihal : Cq. BLH Kota Yogyakarta
di
Yogyakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai Pimpinan Perusahaan/General Manajer/ Manajer
Lingkungan

Nama usaha dan/atau kegiatan :

Jenis usaha dan/atau kegiatan :

Alamat usaha dan/atau kegiatan :

Telp/ Fax :

mengajukan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah
Cair bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
2. Dokumen Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan;
3. Informasi Produksi (Jenis dan kapasitas produksi bulanan, jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan dan jenis dan kapasitas instalasi pengolahan)
4. Data Air Baku (terdiri dari sumber air baku, intake air baku, penggunaan air)
5. Data Air Limbah terdiri dari Gambar Teknis Instalasi Pengolahan Limbah Cair, sumber air limbah, karakteristik air limbah, sistem pengolahan air limbah; sistem pembuangan air limbah, jangka waktu pembuangan limbah.
6. Lokasi, jumlah titik pembuangan dan jumlah air limbah yang dibuang
7. Lokasi sumber air penerima
8. Peta Lokasi pembuangan limbah cair
9. Fotokopi pemeriksaan limbah cair tiga bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi
10. Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat;
11. Kajian Pembuangan Air Limbah.
12. Kajian Pemanfaatan Air Limbah (untuk izin pemanfaatan limbah cair)
13. Jenis dan karakteristik limbah cair yang dimanfaatkan (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
14. Debit, volume dan kualitas limbah cair yang dimanfaatkan (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
15. Lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan limbah cair (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
16. Lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan limbah cair (untuk izin pemanfaatan limbah cair).

17. Metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan (untuk izin pemanfaatan limbah cair).
18. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair
19. Surat Pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair
20. Surat Pernyataan kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan
21. Surat Pernyataan akan mengolah limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis
22. hasil laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada periode terakhir;
23. surat pernyataan kesanggupan bermaterai untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatannya.

Saya menyatakan bahwa semua keterangan tertulis dan lampiran dalam permohonan ini dibuat dengan benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila semua keterangan tersebut tidak benar.

.....,

Tandatangan
Nama Lengkap
Jabatan

(cap perusahaan)

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bimasakti No.1 Telp./ Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221
EMAIL : lingkungan@jogjakota.go.id; EMAIL INTRANET : lingkungan@intra.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

Membaca : 1. Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dari

Nomor :

Nama :

Alamat :

Menimbang : a. bahwa untuk penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Izin Pemanfaatan Limbah Cair diperlukan persyaratan teknis dan administratif berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan telah terpenuhi;

b. bahwa menindaklanjuti penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair kepada:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat Outlet Limbah Cair :
- h. Sumber Limbah yang dibuang :

KEDUA : Dalam melakukan pembuangan air limbah, Penanggungjawab Kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan tentang jenis limbah cair yang diizinkan untuk dibuang, yaitu berupa limbah cair dari hasil kegiatan sendiri;
2. Mengikuti persyaratan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
3. Pembuangan limbah cair dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke dalam air atau sumber air.
- b. Limbah cair yang dibuang wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata.
- c. Tidak melampaui beban dan debit maksimum yang telah ditentukan di dalam IPLC
- d. Tidak melakukan pengenceran
- e. Tidak melakukan runoff ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan
- f. Tidak melakukan pemanfaatan limbah cair di lokasi selain yang ditetapkan didalam pengkajian
- g. Tidak membuang limbah cair yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air
- h. Memasang alat ukur debit limbah cair yang dibuang
- i. Membangun bangunan dan saluran pembuangan limbah cair untuk memudahkan pengambilan sampel limbah.
- j. Wajib memeriksakan limbah cair setiap bulan sekali dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Walikota Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta setiap tiga bulan.
- k. Memperhatikan ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (safety shower/eye wash) dan fasilitas tangap darurat.

KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan wajib melaporkan realisasi kegiatan pembuangan dan pemanfaatan limbah cair, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditunjukkan kepada :

1. Walikota Yogyakarta Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Gubernur DIY; Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa; Menteri Lingkungan Hidup Cq. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, dan Sampah;

KEEMPAT : Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair alat merupakan sarana pengawasan bagi:

- a. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana Diktum KEEMPAT, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- b. Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan/atau dicabut, apabila Penanggungjawab Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Diktum KEDUA dan KETIGA.

- KELIMA : 1. Permohonan perpanjangan terhadap izin ini diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada izin ini, maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA

(.....)

C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bimasakti No.1 Telp./ Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221

EMAIL : lingkungan@jogjakota.go.id; EMAIL INTRANET : lingkungan@intra.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU
IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cair harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- b. persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENOLAKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

KESATU : Menolak memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair kepada:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat Outlet Limbah Cair :
- h. Sumber Limbah yang dibuang:

KEDUA : Dengan ditolaknya Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang limbah cair ke badan air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH

A. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bimasakti No.1 Telp./ Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221
EMAIL : lingkungan@jogjakota.go.id; EMAIL INTRANET : lingkungan@intra.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU
IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : c. bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cair harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- d. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah;

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

KESATU : Mencabut Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair dari:

- i. Nama :
- j. Alamat :
- k. Nama Perusahaan :
- l. Alamat Perusahaan :
- m. Bidang Usaha :
- n. Telepon/Faksimile :
- o. Titik koordinat Outlet Limbah Cair :
- p. Sumber Limbah yang dibuang :

KEDUA : Dengan dicabutnya Surat Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang limbah cair ke badan air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA

(.....)

B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Bimasakti No.1 Telp./ Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221

EMAIL : lingkungan@jogjakota.go.id; EMAIL INTRANET : lingkungan@intra.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU
IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa permohonan izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cair harus segera memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;

b. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan sesuai hasil pemeriksaan petugas lapangan yang dimuat dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tidak terpenuhi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATALAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN/ATAU PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

KESATU : Membatalkan Izin Pembuangan Limbah Cair dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair dari:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Perusahaan :
- d. Alamat Perusahaan :
- e. Bidang Usaha :
- f. Telepon/Faksimile :
- g. Titik koordinat Outlet Limbah Cair :
- h. Sumber Limbah yang dibuang :

KEDUA : Dengan dibatalkannya Surat Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka dilarang membuang limbah cair ke badan air penerima dan dilarang melakukan pemanfaatan limbah cair.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI